



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(BIDANG DEPARTEMEN KESEHATAN,
DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN PENGAWAS OBAT & MAKANAN, BKKBN DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	: 2007-2008
Masa Persidangan	: III
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala BKKBN
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 26 Februari 2008
Waktu	: Pukul 14. ⁰⁰ WIB – selesai
Ketua Rapat	Max Sopacua, SE, M.Sc. / Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gd. Nusantara I DPR RI, Jakarta
Acara	: 1. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas BKKBN; 2. Membicarakan hasil kunjungan kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun Sidang 2007-2008 ke Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Jawa Barat 3. Lain-lain.
Anggota yang hadir	: 31 Anggota dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI, 4. orang Ijin, 2 orang Sakit.

Rapat Dengar Pendapat Komisi IX DPR RI dengan Kepala BKKBN dibuka oleh Ketua Rapat pukul 14.10 WIB karena belum kuorum maka rapat diskors selama 15 menit. Skors dicabut dan Rapat dibuka kembali pada pukul 14.30 dan sesuai dengan Tata Tertib Pasal 99 ayat (1) rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

Paparan Kepala BKKBN mengenai masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas BKKBN, hasil kunjungan kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan II Tahun 2007-2008 ke Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara dan Jawa Barat serta masalah-masalah lainnya.

KESIMPULAN / KEPUTUSAN

Setelah mendengarkan usulan/pendapat dari Anggota Komisi IX DPR RI dan jawaban dari Kepala BKKBN, maka kesimpulan Rapat Dengar Pendapat hari ini, adalah :

1. Komisi IX DPR RI mendukung komitmen BKKBN untuk meningkatkan aktivitas program KB dan kerjasama lintas sektoral dalam rangka mencapai sasaran pembangunan nasional dan global (millennium development goals)
2. Komisi IX DPR mendukung BKKBN untuk membangkitkan kembali program KB Mandiri atau Lingkaran Biru sehingga dapat meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KB..
3. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk meningkatkan kegiatan penyuluhan KB dengan melibatkan institusi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan LSM, serta menggalakkan Program KB Keliling dalam rangka meningkatkan cakupan kepesertaan KB..
4. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN bersama dengan Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Aparatur Negara RI memperbanyak status kelembagaan KB di kabupaten/kota berupa Peraturan Daerah sehingga dukungan alokasi anggaran untuk program KB menjadi lebih terjamin dan berkelanjutan.
5. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk mencari terobosan-terobosan dalam rangka meningkatkan kepesertaan KB pria seperti melakukan perubahan "*mind set*" kepesertaan bahwa program KB merupakan program bersama.
6. Komisi IX DPR RI mendesak BKKBN untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Menteri Kesehatan dalam rangka mempercepat perubahan RUU tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Rapat ditutup pukul 16.50WIB

Jakarta, 26 Februari 2008

Pimpinan Komisi IX DPR RI
Wakil Ketua,



Max Sopacua, SE, M.Sc.

Kepala BKKBN,



Dr. Sugiri Syarief, MPA